

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik di Filipina Selatan mempunyai latar belakang sejarah yang sangat kompleks dan mendalam. Salah satu kompleksitas tersebut adalah konflik agama, antara Islam dan Katolik yang berawal sejak masa penjajahan Spanyol dan Amerika. Islam mulai menyebar di kepulauan Filipina pada akhir abad ke-14, lalu secara bertahap menciptakan ikatan dalam budaya dan tradisi asli suku Moro. Oleh karena itu, ketika bangsa Spanyol tiba di kepulauan Filipina pada awal abad ke-16, komunitas Muslim telah menjadi kekuatan yang kuat dengan basis di daerah seperti Mindanao, Sulu, Tawi-Tawi, dan Palawan. Agama Islam telah masuk ke dalam banyak aspek kehidupan masyarakat di daerah tersebut, dan telah berfungsi sebagai pilar budaya, sosial, dan politik yang memengaruhi struktur masyarakat di kepulauan tersebut.

Latar belakang sejarah ini menceritakan bagaimana konflik telah meluas sepanjang periode penjajahan Filipina. Penjajahan pertama oleh Spanyol terjadi pada abad ke-16 di wilayah Bangsamoro, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Selama masa itu, Spanyol mencoba untuk melakukan kristenisasi terhadap masyarakat Muslim dan mengintegrasikannya ke dalam kerajaan kolonial mereka. Namun, upaya ini sering kali menimbulkan pertentangan dan konflik yang berlarut-larut (Canoy, 1989).

Gowing juga mencatat dalam analisisnya bahwa sebelum kedatangan bangsa Spanyol ke Filipina, agama Islam sudah menyebar hingga ke Manila dan telah menjadi agama yang diakui di beberapa wilayah di pulau Luzon. Di pusat kekuasaan Manila, sistem pemerintahan dipimpin oleh Raja Sulayman dan pamannya, Lakandula, yang memiliki hubungan kerabat yang erat dengan Sultan Brunei. Fakta bahwa Islam telah mendapat pengakuan dan peran penting dalam pemerintahan di Manila sebelum kolonisasi Spanyol, menyoroti kompleksitas dinamika politik dan agama di kepulauan Filipina pada periode sebelum kolonisasi tersebut (Gowing, 1983).

Proses menuju perdamaian dan resolusi konflik di Bangsamoro telah melibatkan sejumlah perundingan dan perjanjian, seperti Perjanjian *Bangsamoro Framework Agreement* yang ditandatangani pada tahun 2012. Isi perjanjian tersebut terkait dengan pembangunan ekonomi, dan pemulihan daerah yang terkena dampak konflik tetap ada dalam agenda. Konflik ini menggambarkan kompleksitas serta perjuangan yang melibatkan berbagai dimensi etnis, agama, dan politik (Narciso, Husein, & Risakotta, 2012).

Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk menciptakan suatu entitas politik otonom yang baru, yang disebut Bangsamoro. Ini akan menggantikan Wilayah Otonom Muslim Mindanao (ARMM), yang sebelumnya dianggap oleh mantan Presiden Benigno Aquino III sebagai "percobaan yang gagal". FAB mencakup bagian-bagian dari pembentukan Bangsamoro, seperti pembentukan hukum dasar, pembagian kekayaan dan sumber pendapatan, dan pembagian wilayah dan hak-hak dasar setiap orang yang tinggal di wilayah tersebut, termasuk penduduk Muslim, pribumi, dan semua orang lain. FAB juga menegaskan bahwa Komisi Transisi (TransCom) harus dibentuk. Komisi Transisi akan bertanggung jawab untuk menyusun Hukum Dasar Bangsamoro, membuat usulan perubahan pada Konstitusi Filipina untuk menerima dan mengintegrasikan kesepakatan yang dicapai oleh para pihak, dan berkolaborasi sejauh yang diperlukan untuk program pengembangan komunitas Bangsamoro (peacemaker.un.org, 2012).

Setelah FAB tercapai, kedua belah pihak melanjutkan perundingan yang berakhir dengan kesepakatan *Comprehensive Agreement on the Bangsamoro* (CAB). Perjanjian ini mengakui keluhan yang sah dari masyarakat Bangsamoro. Hal ini menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk menghormati hak setiap orang untuk identitas mereka dan menjunjung tinggi martabat setiap anggota komunitas politik. Kedua belah pihak berjanji untuk terus berbicara secara lintas sektor, mempertimbangkan masalah pihak-pihak yang terlibat, mendapatkan dukungan yang luas, dan memastikan partisipasi yang melibatkan berbagai proses dan mekanisme yang akan diterapkan. Perjanjian ini juga menetapkan kerja sama antara kedua pihak dan kelompok serta sektor lain untuk membentuk entitas politik Bangsamoro yang baru yang dinamakan *Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao* (BARMM) (peacemaker.un.org, 2014).

Selain itu, perjanjian ini juga menjelaskan prosedur dan modalitas yang diperlukan untuk menerapkannya secara menyeluruh. Sesuai dengan Pasal V dari Wilayah Perjanjian Kerangka Kerja Bangsamoro, Hukum Dasar Bangsamoro harus disetujui, yang merupakan langkah penting. Jika perjanjian ini dilaksanakan dengan benar, diharapkan akan menghasilkan pembentukan Otoritas Transisi Bangsamoro dan Pemerintah Bangsamoro yang teratur. Selanjutnya, kedua belah pihak secara bertahap menormalisasi wilayah yang sebelumnya terkena dampak konflik dan mengubahnya menjadi komunitas yang aman dan maju. Hal ini tentu merupakan langkah besar menuju stabilitas dan perdamaian di wilayah tersebut.

CAB merupakan usaha untuk mengakhiri konflik bersenjata antara pemerintah Filipina dan MILF serta mendorong perdamaian dan stabilitas di daerah tersebut. Secara tegas, para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini mengakui kewajiban mereka untuk menjaga prinsip-prinsip keadilan. Kedua belah pihak berkomitmen untuk melindungi dan meningkatkan hak-hak asasi manusia, serta untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan politik. Kedua belah pihak juga bertekad untuk mengoreksi ketidakadilan sejarah yang telah dilakukan terhadap Bangsamoro dan menghilangkan ketidaksetaraan budaya melalui kerangka modalitas yang telah disepakati untuk secara adil membagi kekayaan dan kekuasaan. Sesuai dengan Artikel V dari Perjanjian Kerangka tentang Bangsamoro, CAB mengesahkan Bangsamoro sebagai entitas politik otonom baru. Ini juga melibatkan pembentukan dan persetujuan Hukum Dasar (peacemaker.un.org, 2014).

Pada proses negosiasi perdamaian antara pemerintah Filipina dengan MILF, Jepang hadir sebagai negara yang terlibat dalam proses tersebut antara kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan Jepang telah menjadi bagian dari *International Contact Group* (ICG) yang dimana tugas utama dari ICG adalah memfasilitasi dan mendukung proses perundingan. Jepang mulai aktif terlibat dalam upaya perdamaian dan pembangunan di wilayah Bangsamoro pada tahun 2006. Peran aktif Jepang dalam peacebuilding di Bangsamoro dilakukan dengan mendukung secara finansial dan juga membangun proyek-proyek teknis, serta partisipasi dalam perundingan-perundingan perdamaian (Ateneo De Manila, 2023).

Sebelum bergabung dengan *International Contact Group* (ICG), Jepang juga telah bergabung dengan *The International Monitoring Team* yang telah diresmikan pada tahun 2005 di Malaysia. Sejak dibentuk pada tahun 2005, *International Monitoring Team* (IMT) telah memainkan peran yang integral dalam menjaga stabilitas, mendukung implementasi perjanjian perdamaian, dan mengawasi pelaksanaan gencatan senjata antara *Moro Islamic Liberation Front* (MILF). Misi IMT adalah memantau secara aktif terhadap perkembangan di lapangan, melaporkan pelanggaran gencatan senjata, memfasilitasi dialog dan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat (Abubakar, 2005).

Selain bergabung dengan ICG dan juga IMT, Jepang telah memiliki program tersendiri yang bernama *Japan-Bangsamoro Initiative for Reconstruction and Development* (J-BIRD). Hal ini sudah dimulai sejak 2006. Tujuan dari inisiasi ini adalah untuk membantu proses rekonsiliasi, pembangunan, dan kemanusiaan di wilayah Bangsamoro Filipina Selatan yang sebelumnya menjadi tempat konflik bersenjata. J-BIRD telah melakukan banyak hal penting sejak didirikan. Ini termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses ke pendidikan melalui pembangunan dan renovasi sekolah, bantuan kemanusiaan seperti bantuan medis, dan upaya untuk mendorong percakapan dan rekonsiliasi antara berbagai kelompok di wilayah Bangsamoro (Japan International Cooperation Agency, 2023).

Pada penelitian kali ini, peneliti akan membahas mengenai upaya Jepang dalam pembangunan perdamaian pasca perjanjian *Comprehensive Agreement on the Bangsamoro* yang disepakati pada tahun 2014.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya Jepang dalam menjalankan misi perdamaian pasca CAB tahun 2014?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis peran Jepang dalam proses perdamaian. Serta menilai secara kritis peran Jepang dalam mendukung upaya perdamaian pasca-tanda tangan *Comprehensive Agreement on Bangsamoro* (CAB) 2014 antara Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan Pemerintah Filipina.
2. Mengevaluasi dampak bantuan pembangunan Jepang. Serta mengukur sejauh mana bantuan pembangunan yang diberikan oleh Jepang telah berdampak positif pada pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kondisi kehidupan di wilayah Bangsamoro setelah perjanjian CAB.

#### 1.4 Hipotesa

Upaya Jepang dalam menjalankan misi perdamaian pasca CAB tahun 2014 adalah:

1. Jepang berusaha mewujudkan misi perdamaian dengan memberikan bantuan pada sektor infrastruktur seperti sekolah, rumah, dll.
2. Jepang berusaha mewujudkan misi perdamaian dengan memberikan bantuan pada sektor kesehatan seperti rumah sakit, obat-obatan.
3. Jepang berusaha mewujudkan misi perdamaian dengan memberikan bantuan pada sektor pembangunan kemanusiaan seperti memberikan pelatihan terhadap warga Bangsamoro.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap literatur tentang konflik dan perdamaian, terutama dalam konteks Asia Tenggara. Penelitian ini akan membantu memperkaya pemahaman tentang peran aktor internasional, seperti Jepang, dalam memfasilitasi perdamaian di wilayah-wilayah yang terkena dampak konflik bersenjata.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang bermanfaat bagi organisasi-organisasi kemanusiaan dan nirlaba yang aktif di Bangsamoro. Serta diharapkan dapat menggunakan penelitian ini untuk mengarahkan upaya dan bantuan organisasi-organisasi di Bangsamoro dengan lebih efektif.

## 1.6 Landasan Teori

Pada sub point kerangka teori dalam proposal skripsi ini, kerangka teori yang digunakan akan didasarkan pada konsep *peacebuilding* yang diperkenalkan oleh beberapa tokoh penting dalam studi hubungan internasional. Konsep *peacebuilding* telah lama menjadi bagian integral dalam praktik perdamaian dan konflik antarnegara. Salah satu tokoh yang mencetuskan konsep *Peacebuilding* adalah John Paul Lederach, seorang akademisi dan praktisi yang dikenal dalam bidang studi perdamaian dan konflik, yang telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan pemahaman tentang proses pembangunan perdamaian pasca-konflik dan bagaimana melibatkan berbagai pihak dalam upaya tersebut. Lederach memainkan peran kunci dalam menggarisbawahi pentingnya komunikasi, dialog, dan rekonsiliasi dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan (Lederach, 1998).

Selanjutnya, konsep *peacebuilding* dalam studi hubungan internasional dikembangkan oleh beberapa pemikir penting seperti John Darby dan Roger Mac Ginty, dalam karyanya yang berjudul "*Contemporary Peacebuilding: Conflict, Violence, and Peace Processes*", menggarisbawahi *peacebuilding* sebagai sebuah proses jangka panjang yang melibatkan upaya-upaya untuk membangun dan memperkuat lembaga-lembaga dan struktur-struktur yang mendukung perdamaian. Hal ini mencakup rekonsiliasi, pembangunan ekonomi, dan pembangunan sosial (Darby & Ginty, 2003). Oliver Richmond, dalam karyanya yang berjudul "*Peace in International Relations*", memandang *peacebuilding* sebagai pendekatan yang lebih luas, mencakup upaya untuk membangun kapasitas negara dan masyarakat serta menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung perdamaian yang berkelanjutan. Hal ini termasuk pekerjaan dalam membangun lembaga, mengatasi ketidaksetaraan, dan mempromosikan rekonsiliasi (Richmond, 2020). David

Chandler, melalui karyanya yang berjudul "*Empire in Denial: The Politics of State-Building*", berpendapat bahwa *peacebuilding* dapat menjadi proyek yang kompleks dan sering kali mengandung dimensi politis yang kuat. Ia mencatat bahwa pendekatan *peacebuilding* sering kali merupakan bagian dari proyek-proyek pemerintah, dan dalam beberapa kasus, dapat menjadi bermasalah karena konflik kepentingan yang terlibat (Chandler, 2006).

Konsep teori *peacebuilding* yang dicetuskan oleh John Paul Lederach merupakan suatu pendekatan yang mendalam dalam memahami, merencanakan, dan melaksanakan upaya untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan dalam konteks konflik. Dalam pendekatan partisipatif, Teori pembangunan perdamaian Lederach menekankan bahwa masyarakat yang terkena dampak konflik harus berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan upaya perdamaian. Ini melibatkan pemberdayaan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam menentukan, merencanakan, dan mengelola upaya perdamaian (Lederach, 1998).

Dalam konsep ini, *peacebuilding* mencakup serangkaian tindakan konkret yang bertujuan untuk mengatasi konflik dan membangun perdamaian yang berkelanjutan. Salah satu hal konkret yang bisa diberikan dari *peacebuilding* adalah pendekatan rekonsiliasi konflik yang melibatkan dialog terbuka dan jujur antara pihak-pihak yang berselisih. Ini mencakup pertemuan damai, sesi mediasi, dan upacara rekonsiliasi yang dirancang untuk memahami dan mengatasi ketidaksepahaman serta trauma yang mungkin timbul selama konflik.

Selanjutnya, *peacebuilding* juga mencakup pembangunan berkelanjutan dengan memberikan dukungan dalam bentuk infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di wilayah yang terpengaruh. Misalnya, dengan membangun sekolah, rumah sakit, dan jaringan transportasi, masyarakat dapat merasakan dampak positif langsung, yang membantu membangun fondasi yang stabil untuk masyarakat yang damai. Dengan demikian, *peacebuilding* tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga memperhatikan pembangunan jangka panjang untuk menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang mendukung perdamaian yang berkelanjutan (McLaughlin, 2017).

Dengan mengintegrasikan konsep *peacebuilding* yang telah diperkenalkan oleh John Paul Lederach dan para ahli lainnya, kerangka teori ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep *peacebuilding* pada upaya Jepang dalam pembangunan perdamaian pasca perjanjian *Comprehensive Agreement on the Bangsamoro* (CAB).

### 1.7 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2018), penelitian kualitatif merupakan penelitian di mana objek yang akan diteliti bersifat alamiah. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang juga bersifat deskriptif, di mana data-data yang terkumpul akan menjadi kumpulan kata-kata ataupun gambar. Sehingga, penelitian yang berjenis kualitatif tidak terlalu memfokuskan kepada angka-angka.

### 1.8 Sumber Data

Sumber data yang peneliti akan dapatkan, berasal dari sumber data primer dan juga sekunder. Adapun sumber data akan peneliti dapatkan dari:

1. Mengumpulkan dokumen-dokumen sekunder yang berkaitan dengan judul penelitian, seperti laporan berita, artikel Jurnal, atau publikasi akademik yang membahas penelitian tersebut.
2. Menganalisis dokumen-dokumen tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang konteks *peacebuilding*.
3. Menggunakan pemahaman yang diperoleh untuk mendukung argumen dan kesimpulan dalam penelitian.

### 1.9 Kerangka Penulisan

1. Pada **BAB I**, peneliti akan menulis mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesa, manfaat penelitian, landasan teori, serta metode penelitian. Pada latar belakang masalah, peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang konflik MILF dengan pemerintah Filipina, proses negosiasi MILF dengan pemerintah Filipina,



penjelasan mengenai *Framework Agreement on the Bangsamoro* (FAB), penjelasan mengenai *Comprehensive Agreement on the Bangsamoro* (CAB), dan juga menjelaskan bagaimana Jepang berkontribusi terhadap perdamaian di Filipina sebelum kesepakatan CAB diresmikan.

2. Pada **BAB II**, peneliti akan menulis mengenai pembahasan mengenai sejarah konflik MILF dengan pemerintah di Filipina serta hubungan Jepang dengan proses perdamaian di Bangsamoro sebelum tahun 2014.
3. Pada **BAB III**, peneliti akan menulis mengenai hasil dan analisis yang selanjutnya diambil dari rumusan masalah mengenai bagaimana upaya Jepang dalam mewujudkan perdamaian pasca perjanjian *Comprehensive Agreement on the Bangsamoro* di tahun 2014 .
4. Pada **BAB IV**, peneliti akan menulis mengenai penutup sebagai halaman terakhir dari skripsi yang berisikan kesimpulan.